STUDI DESKRIPTIF PEMAHAMAN KONSELOR TENTANG LAYANAN KONSULTASI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SUB RAYON 03 KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009

skripsi

disajikan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Jurusan Bimbingan dan Konseling

oleh

Wahyu Margiyani

1301404066

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Kampus Sekaran Gd. A2 Telp. 356285, Fax. (024) 356385 Gunungpati Semarang 50229

PERNYATAAN SELESAI BIMBINGAN

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Wahyu Margiyani

NIM : 1301404066

Jurusan : Bimbingan dan Konseling

Judul Skripsi : Studi Deskriptif Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi Bimbingan Dan Konseling Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009

Telah selesai melakukan bimbingan skripsi dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi.

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Drs. H. Imam Tadjri, M. Pd	Dra. Catharina Tri Anni, M. Pd
NIP. 130687672	NIP. 131633255

Mengetahui,

Ketua Jurusan BK UNNES

Drs. H. Suharso, M.Pd Kons
NIP. 131754158

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Yang menyatakan

Wahyu Margiyani
NIM. 1301404066

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada

Hari :

Tanggal :

Panitia Ujian,

Ketua

Drs. H. Hardjono, M. Pd
NIP. 130781006

Sekretaris

Drs. Eko Nusantoro, M. Pd
NIP. 132205934

Pembimbing I

Drs. H. Imam Tadjri, M. Pd.
NIP. 130687672

Pembimbing II

Dra. Catharina Tri Anni, M. Pd
NIP. 131633255

Anggota Penguji

1. Dra. Hj. Awalya, M. Pd
   NIP. 131754159
2. Drs. H. Imam Tadjri, M.Pd
   NIP. 130687672
3. Dra. Catharina Tri Anni, M. Pd
   NIP. 131633255

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar dari Allah), mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan, Allah mempunyai karunia yang besar {QS. Ali'Imran: 173-174}

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan Mama yang selalu memberikan doa untuk kesuksesanku
2. Kakakku Mas Andy dan Mbak Esty
3. Mas Faisal yang telah memberikan kebahagiaan di kehidupanku
4. Sahabatku Maya, Kay, Siska, Ika, Mas Hanung, Mas Yuli yang selalu membantu setiap kesulitanku
5. Teman – teman Griya Putri 2
6. Teman – teman BK Angkatan 2004

PRAKATA

Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Deskriptif Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi Bimbingan dan Konseling Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009". Skripsi ini menyajikan tentang sejauh mana pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK. Hal ini dikarenakan pemahaman konselor tentang operasionalisasi layanan konsultasi BK dapat mempengaruhi ketercapaian pelaksanaan layanan konsultasi BK.

Penulis menyadari adanya dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Drs. H. Hardjono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Drs. H. Suharso, M.Pd Kons sebagai Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. H. Imam Tadjri, M.Pd sebagai pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skipsi ini.
4. Dra. Catharina Tri Anni, M.Pd sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan kesabaran dalam membimbing penyusunan skipsi ini.

5. Penguji utama Dra. Awalya, M. Pd dengan bijaksana memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Kepala SMP Negeri se Sub Rayon 03 Kota Semarang yang telah memberikan ijin dalam mengadakan penelitian, dan Kepala SMP Swasta Sub Rayon 03 Kota Semarang yang telah memberikan ijin mengadakan uji coba instrumen penelitian.
7. Konselor SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang sebagai responden penelitian dan konselor SMP Swasta Sub Rayon 03 Kota Semarang sebagai responden uji coba instrumen penelitian yang telah memberikan waktu dan kerja samanya selama ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Terima kasih.

Semarang, Februari 2009

Penulis

ABSTRAK

Margiyani, Wahyu. 2009. *"Studi Deskriptif Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi Bimbingan dan Konseling Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009"*. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. H. Imam Tadjri, M.Pd, Pembimbing II Dra. Catharina Tri Anni, M.Pd.

Kata kunci: pemahaman konselor, layanan konsultasi BK.

Kegiatan Bimbingan dan Konseling di sekolah mengacu pada BK Pola-17 *Plus* yang salah satunya yaitu konselor melakukan pelayanan tentang layanan konsultasi. Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini adalah persepsi yang salah dari konselor tentang pengertian layanan konsultasi, diantaranya layanan konsultasi dianggap sama dengan layanan konseling perorangan, mengundang orang tua siswa untuk berkonsultasi dengan konselor, masalah yang di bahas adalah masalah yang layak dibahas untuk konseling perorangan, mempertemukan konsulti dengan konseli dan konselor untuk membahas masalah bersama. Fakta yang diperoleh bahwa terhentinya pertemuan MGP di Sub Rayon 03, kurangnya informasi yang didapat konselor tentang pelayanan BK, dan munculnya sikap apatis konselor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK pada SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK pada SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh konselor SMP Negeri di Sub Rayon 03 Kota Semarang, yaitu sebanyak 24 konselor dari tujuh SMPN. Pengambilan data dengan menggunakan angket. Perhitungan validitas dengan rumus korelasi *Product Moment* dan untuk perhitungan reliabilitas dengan rumus *Alpha*. Angket penelitian dianalisis dengan menggunakan perhitungan analisis deskriptif prosentase. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pemahaman konselor tentang layanan konsultasi termasuk dalam kriteria rendah yaitu dengan prosentase hasil 55,79%. Hal ini menunjukkan bahwa konselor belum memahami dengan baik prosedur operasionalisasi layanan konsultasi, yang meliputi perencanaan layanan konsultasi, pelaksanaan layanan konsultasi, evaluasi layanan konsultasi, analisis hasil evaluasi layanan konsultasi, dan tindak lanjut layanan konsultasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada konselor sekolah supaya secara mandiri berusaha mengetahui dan mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan BK, kepada jurusan BK agar mengadakan seminar atau pelatihan khususnya pada layanan konsultasi, bagi mahasiswa BK diharapkan memperdalam pengetahuan tentang layanan konsultasi dan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan tema layanan konsultasi BK.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
PENGESAHAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
PRAKATA v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR LAMPIRAN xi

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Sistematika Skripsi 10
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemahaman Konselor 12
2.1.1 Konsep Pemahaman 12
2.1.2 Pengertian Konselor 15
2.1.3 Kualitas Pribadi Konselor 16
2.1.4 Sikap dan Keterampilan Konselor 17
2.2 Layanan Konsultasi 18
2.2.1 Kedudukan Layanan Konsultasi Dalam Bimbingan dan Konseling Pola 17 Plus 18
2.2.2 Pengertian Layanan Konsultasi 19
2.2.3 Tujuan Layanan Konsultasi 21
2.2.4 Komponen Layanan Konsultasi 22
2.2.5 Asas Layanan Konsultasi 24

2.2.6 Operasionalisasi Layanan Konsultasi 25
2.3 Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi 36
2.4 Penelitian Terdahulu 38
3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian 40
3.2. Variabel Penelitian 41
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 42
3.4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 44
3.5. Uji Instrumen 49
3.6. Metode Analisis Data 51
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian 52
4.1.1 Persiapan Penelitian 52
4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 54
4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Penelitian 54
4.2. Pembahasan 61
5. PENUTUP
5.1. Simpulan 65
5.2. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Konselor SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 43

Tabel 3.2 Daftar Jumlah Konselor SMP Swasta Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaaran 2008/2009 44

Tabel 3.3 Cara Penyekoran Butir Item 47

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi 47

Tabel 4.1 Prosentase Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi BK pada SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Uji Coba Instrumen
   a. Kisi-kisi Uji Coba Instrumen 69
   b. Angket Uji Coba Instrumen 71
   c. Tabel Perhitungan Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 76
   d. Contoh Perhitungan Validitas Angket Penelitian 79
   e. Contoh Perhitungan Reliabilitas Angket Penelitian 80
2. Data Penelitian
   a. Kisi-kisi Penelitian 81
   b. Angket Penelitian 83
   c. Tabulasi Data Hasil Penelitian 88
   d. Analisis Deskriptif Prosentase 91
3. Daftar Alamat SMP Sub Rayon 03 Kota Semarang 94
4. Daftar Responden
   a. Uji Coba 95
   b. Penelitian 96
5. Surat – surat penelitian 97
6. Surat ijin pra penelitian 107
7. Surat – surat uji coba instrumen 108

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Arah pembentukan lembaga ini yaitu memberikan kemudahan pencapaian perkembangan yang optimal terhadap peserta didik. Untuk mencapai perkembangan diri yang optimal, dalam kelembagaan sekolah diwujudkan dengan adanya bidang pelayanan pendidikan, salah satunya adalah pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di Sekolah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dari Prayitno dan Amti (2004: 114), bahwa

> Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

"Sejak tahun 1993 penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah memperoleh perbendaharaan istilah baru, yaitu BK Pola-17" (Prayitno, 2004: i). BK Pola-17 merupakan pola dasar dalam BK yang di laksanakan di lingkungan sekolah. Pola ini meliputi empat bidang bimbingan, tujuh layanan BK, dan lima kegiatan pendukung BK. Dengan berkembangnya zaman, pada abad ke-21 BK Pola-17 berkembang menjadi BK Pola-17 *Plus*. Hal

ini dikarenakan adanya pengembangan sasaran pelayanan BK yang lebih luas. Butir-butir pokok BK Pola-17 *Plus* meliputi keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas, serta landasan BK; enam bidang pelayanan BK; sembilan jenis layanan BK; enam kegiatan pendukung BK; serta format pelayanan yang mencakup format individual, kelompok, klasikal, lapangan, dan politik.

BK Pola-17 *Plus* menjadi bidang tugas bagi konselor sekolah dalam pelayanan konseling. Salah satu jenis layanan pada BK Pola-17 *Plus* adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi dalam BK Pola-17 *Plus* merupakan pengembangan dari layanan pada BK Pola 17. Layanan konsultasi merupakan hal yang baru bagi BK di Sekolah, khususnya bagi konselor sekolah. Untuk itu konselor perlu pemahaman yang mendalam tentang layanan konsultasi agar tercapai keberhasilan pelaksanaan layanan.

Menurut G. Caplan (dalam Shertzer dalam Marsudi, 2003: 123) merumuskan, '… *a process of interaction between two professional persons the consultant and the consultee who* involves *the consultant's help in regard to a current problem with which he is having some difficulty* …' (konsultasi sebagai proses interaksi antara dua pribadi profesional: konsultan yang profesional dan konsulti yang minta bantuan konsultan, dari daerah spesialisasi dan yang berwenang terhadap masalah yang dihadapi sekarang. Dijelaskan selanjutnya bahwa yang menghadapi masalah dapat bersifat perorangan maupun organisasi – yang disebut klien). Lebih jelasnya diungkapkan juga oleh Sudrajat (http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/07/08), bahwa konsultasi yaitu

layanan yang membantu konsulti dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.

Penyelenggaraan layanan konsultasi sebagai fungsi pengentasan, yaitu mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga. Layanan konsultasi merupakan bentuk dari layanan responsif yang menurut Zein (http://smpnbilahhulu. wordpress.com/2008/02/01) bahwa tujuan layanan ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengatasi masalah yang dialaminya. Dalam hal ini, penyelesaian masalah yang dialami oleh peserta didik dilakukan oleh konsulti setelah melakukan konsultasi dengan konsultan/ konselor sekolah. Dilakukan oleh konsulti dengan alasan bahwa peserta didik mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh peserta didik itu setidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti.

Untuk menjamin kesuksesan layanan konsultasi, maka konselor juga perlu memperhatikan dan memahami adanya langkah-langkah pelaksanaan layanan konsultasi. Menurut Prayitno (2004: 30-31), mengemukakan langkah-langkahnya sebagai berikut:

> (1) Perencanaan, yang meliputi mengidentifikasi konsulti, mengatur pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi, (2) Pelaksanaan, dimulai dari menerima konsulti, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga, mendorong dan melatih konsulti untuk : mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling, dan melakukan penilaian segera, (3) Evaluasi, yaitu melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaan hasil konsultasi, (4) Analisis Hasil Evaluasi, yaitu menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri pihak ketiga dan konsultasi sendiri, (5)

Tindak Lanjut adalah konsultasi lanjutan dengan konsulti untuk membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan lebih lanjut.

Layanan konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan, salah satunya adalah di sekolah. Dalam proses pendidikan di sekolah banyak dijumpai permasalahan yang dialami oleh siswa, baik yang bersumber dari pribadi siswa sendiri ataupun lingkungan. Untuk membantu terselesaikannya masalah siswa, proses konseling *(face to face)* sepenuhnya tidak harus dilakukan oleh konselor sekolah kepada siswa melalui konseling individu. Bantuan juga dapat dilakukan oleh konsulti sebagai pihak yang ikut merasa bertanggung jawab atas masalah siswa. Dengan alasan tersebut, maka layanan konsultasi di sekolah penting untuk diselenggarakan.

Layanan konsultasi dalam BK berbeda dengan pengertian konsultasi pada umumnya. Konsultasi dalam BK bukan hanya sekedar memberikan sumbangan nasehat, saran, dan arahan yang dilakukan oleh konsultan. Pelayanan pada layanan konsultasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu proses konsultasi antara konsultan dengan konsulti kemudian proses penanganan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Asas dalam layanan konsultasi menyebutkan bahwa kehadiran konsulti untuk melakukan konsultasi dilakukan secara sukarela atas keinginan konsulti sendiri. Kehadiran konsulti dikarenakan membutuhkan bantuan konselor untuk mendiskusikan hal yang berkenaan dengan diri konsulti maupun permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga/ peserta didik.

Permasalahan dalam layanan konsultasi merupakan masalah yang dialami oleh pihak ketiga yang dipersoalkan oleh konsulti. Tidak semua permasalahan

dapat dibahas dalam layanan konsultasi. Masalah yang dibahas dalam layanan konsultasi harus ada keterkaitannya secara langsung antara pihak ketiga dengan konsulti. Untuk membantu menyelesaikan masalah pihak ketiga, konsultan membekali konsulti dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) dari konsulti. Dengan pengembangan WPKNS inilah maka konsulti dapat melakukan penanganan masalah yang dialami oleh pihak ketiga.

Memahami menurut Tyler diartikan sebagai usaha merenggut makna secara jelas dan lengkap terhadap apa yang telah dijelaskan. Pemahaman menurut Gilmore juga merupakan kemampuan merenggut makna dan atau kemampuan untuk memprediksi, sebagai tugas yang amat sulit (Awalya, 1995: 31). Pemahaman tidak dapat dilakukan seseorang dengan mudah, karena dalam memahami tidak cukup untuk sekedar mengingat tetapi harus dapat memperoleh makna dan kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik.

Pemahaman konselor tentang layanan konsultasi diartikan bahwa, setelah konselor mendapatkan informasi tentang layanan konsultasi, kemudian konselor mampu untuk mengingat informasi yang didapatkan dan pada akhirnya diperoleh pemahaman tentang langkah-langkah pelaksanaan layanan konsultasi yang tertib dan lengkap dan mampu untuk menjelaskan kembali apa yang telah dipahami. Pemahaman konselor tentang langkah-langkah pelaksanaan layanan konsultasi yang tertib dan lengkap, akan menjadikan sedikit kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan layanan konsultasi.

Sebelum melakukan layanan konsultasi, akan lebih baik jika konselor terlebih dahulu telah memahami tentang operasionalisasi layanan konsultasi.

Peranan pemahaman sangat penting bagi konselor dalam pelaksanaan layanan konsultasi. Adanya pemahaman konselor tentang layanan konsultasi, maka konselor dapat melaksanakan layanan konsultasi dengan baik dan kemungkinan hanya terjadi sedikit kesalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 17 konselor yang ada di enam sekolah wilayah SMP Sub Rayon 03 Kota Semarang yaitu mengungkap tentang pelaksanaan BK di Sekolah, khususnya tentang layanan konsultasi diperoleh informasi bahwa (1) pemberitahuan adanya layanan konsultasi pernah disampaikan saat pertemuan MGP, tetapi tidak dijelaskan secara detail, (2) pertemuan MGP di sub rayon 03 yang semula diadakan tiap bulan, untuk saat ini sudah ditiadakan sehingga penyampaian informasi berkaitan dengan BK terhenti, (3) konselor biasanya terlambat mengetahui informasi tentang diadakannya seminar, workshop, ataupun pelatihan BK lainnya, (4) pelatihan yang diikuti konselor bersifat monoton, yaitu hanya pelatihan bimbingan kelompok saja, (5) munculnya sikap tidak peduli konselor pada SMP Sub rayon 03 terhadap perkembangan kegiatan BK, sehingga menyebabkan konselor kurang mendalami hal yang terkini tentang BK, (6) untuk saat ini jumlah konselor belum memenuhi syarat, seharusnya pada sekolah menengah rasio seorang konselor untuk 150 orang peserta didik, tetapi pada pelaksanaannya belum memenuhi syarat tersebut, (7) adanya pengakuan dari konselor sekolah bahwa mereka sudah melaksanakan layanan konsultasi yaitu kepada orang tua dan wali kelas atau guru mata pelajaran, tetapi berdasarkan analisa peneliti bahwa apa yang konselor pahami tentang layanan konsultasi belum benar karena orang tua/ wali kelas/ guru pelajaran hanya

memberikan informasi sedangkan bantuan kepada siswa tetap dilakukan secara langsung oleh konselor sendiri (konseling perorangan),.

Sesuai dengan data perolehan hasil wawancara, maka dapat diuraikan lebih lanjut tentang kurangnya pemahaman konselor mengenai layanan konsultasi disebabkan karena (1) terbatasnya informasi yang diperoleh konselor yang disebabkan penyelenggaraan sosialisasi tentang layanan konsultasi belum dilakukan dengan optimal, salah satu yang menyebabkan adalah terhentinya pelaksanaan MGP, (2) adanya sikap apatis konselor yaitu hilangnya ketertarikan atau tidak peduli terhadap perkembangan yang terjadi dalam BK. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mengetahui hal baru, dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang yang *need of achievement* nya rendah, (3) penyelenggaraan pelatihan BK tidak tepat sasaran, maksudnya sering diadakan pelatihan tentang bimbingan dan konseling kelompok, tetapi masih belum tentang layanan konsultasi sehingga hanya pelatihan bimbingan dan konseling kelompok yang diikuti konselor.

Konselor di sekolah memiliki persepsi yang salah tentang pelaksanaan layanan konsultasi. Mereka mengundang orang tua peserta didik datang ke sekolah untuk melakukan konsultasi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan peserta didik di sekolah. Selain itu, pelaksanaan layanan konsultasi dilakukan dengan cara mempertemukan semua pihak dalam satu ruangan. Kegiatan tersebut menurut konselor bahwa mereka telah melakukan layanan konsultasi.

Terdapat kesalahan konselor yaitu suatu permasalahan yang layak dibahas dalam layanan konseling perorangan tetapi mereka bahas dalam layanan

konsultasi. Kesalahan ini terjadi karena masalah yang dibahas bukan masalah pihak ketiga dan pihak ketiga secara spesifik tidak ada. Misalnya kasus orang tua kurang bisa berkomunikasi dengan baik kepada anaknya sehingga menyebabkan anaknya tidak mematuhi perintah orang tua. Pada kasus ini, pihak ketiga tidak ada dan masalah ini bukan masalah pihak ketiga tetapi masalah orang tua sehingga perlu diadakan layanan konseling perorangan bukan layanan konsultasi.

Pada pelaksanaannya di sekolah, tahap konsultasi dilakukan antara konselor dengan konsulti untuk membahas masalah yang dialami pihak ketiga. Tetapi kemudian pada tahap penanganan bukan dilakukan oleh konsulti, tetapi dilakukan oleh konselor sendiri yang pada akhirnya menjadi layanan konseling individual. Pelaksanaan layanan konsultasi yang kurang benar tersebut, dikarenakan kurangnya pemahaman konselor tentang layanan konsultasi. Adanya pemahaman yang mendalam dan praktik yang cukup akan menjadikan modal konselor dalam penguasaan pelayanan konsultasi.

Berdasarkan penjelasan yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori dan pelaksanaan layanan konsultasi di sekolah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Deskriptif Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi Bimbingan dan Konseling Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009. Alasan yang melatar belakangi untuk dilakukannya penelitian ini yaitu:

(1) Pentingnya mengetahui tentang seberapa besar pemahaman konselor tentang layanan konsultasi. Hal ini karena dapat diprediksikan bahwa

semakin tinggi pemahaman konselor tentang layanan konsultasi, maka layanan konsultasi akan dilaksanakan secara tertib dan lengkap.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjadikan sarana mensosialisasikan layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini merupakan layanan hasil pengembangan dari pelayanan BK yang mengacu pada sasaran yang lebih luas sehingga perlu dipelajari, khususnya oleh konselor.

(3) Menurut sepengetahuan penulis, bahwa penelitian tentang tingkat pemahaman konselor tentang layanan konsultasi belum pernah ada yang meneliti, khususnya di jurusan BK Universitas Negeri Semarang sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah pada penelitian adalah : Bagaimana pemahaman konselor tentang layanan konsultasi Bimbingan dan Konseling pada SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konselor tentang layanan konsultasi Bimbingan dan Konseling pada SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang pada Tahun Pelajaran 2008/2009.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya pengembangan wawasan keilmuan bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya pada layanan konsultasi.

1.4.2. Praktis

(1) Sebagai masukan bagi konselor untuk lebih meningkatkan profesionalitasnya berkaitan dengan pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.

(2) Dengan penelitian ini, mahasiswa BK dapat meningkatkan pemahaman tentang pola layanan 17 *Plus* khususnya pada layanan konsultasi.

1.5 Sistematika Skripsi

Bagian awal, berisi tentang halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Landasan Teori, membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi. Pada

bab ini berisi tentang Pengertian pemahaman konselor dan Pengertian layanan konsultasi Bimbingan dan Konseling.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode dan instrumen, uji instrumen, serta metode analisis data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian serta saran – saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian.

Bagian akhir, berisi daftar pustaka serta lampiran – lampiran yang mendukung.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pustaka merupakan unsur yang penting dalam suatu penelitian, sebab pustaka dapat dijadikan sebagai kerangka berfikir bagi peneliti untuk memahami dan menerangkan fenomena yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dalam bab ini akan membahas teori yang melandasi penelitian, yaitu mengkaji pemahaman konselor tentang layanan konsultasi Bimbingan dan Konseling.

2.1 Pemahaman Konselor

2.1.1. Konsep Pemahaman

Memahami menurut Tyler diartikan sebagai usaha merenggut makna secara jelas dan lengkap terhadap apa yang telah dijelaskan. Pemahaman menurut Gilmore juga merupakan kemampuan merenggut makna dan atau kemampuan untuk memprediksi, sebagai tugas yang amat sulit (dalam Awalya, 1995: 31). Pemahaman tidak dapat dilakukan seseorang dengan mudah, karena dalam memahami tidak cukup untuk sekedar mengingat tetapi harus dapat memperoleh makna dan kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik.

Pemahaman adalah suatu proses, seperti yang dikemukakan oleh Gilmore (dalam Awalya, 1995: 32) bahwa terdapat tiga fase proses pemahaman yang dapat dilakukan konselor. Proses pemahaman dapat dilakukan dengan tiga tahapan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Fase I/ Data Input, yaitu konselor menerima informasi verbal dan non verbal.

b. Fase II/ Data Processing, yaitu informasi yang telah diperoleh kemudian diproses melalui sistem konstruk konselor, diorganisir dan disimpan.

c. Fase III/ Data Output, yaitu melakukan koreksi, konfirmasi, dan kemudian tindakan lanjutan terhadap informasi yang telah diperoleh konselor.

Proses pemahaman yang dilakukan oleh konselor terdapat dalam keseluruhan wilayah kehidupan. Terdapat tiga klasifikasi wilayah kehidupan dalam proses pemahaman, meliputi wilayah kehidupan pekerjaan, wilayah kehidupan hubungan atau persahabatan, dan wilayah kehidupan ketersendirian. Ketiga wilayah ini juga perlu dipertimbangkan dalam mengkaji proses pemahaman. Sehingga dapat dimaknai bahwa dalam fase *input*, *processing*, dan *output* perlu diungkapkan juga keterkaitannya dengan wilayah pekerjaan, hubungan atau persahabatan, dan ketersendirian.

Kedudukan wilayah yang berbeda, dapat diselesaikan dengan berbeda pula. Pada periode tertentu satu wilayah dapat menjadi lebih sentral bagi keberadaan seseorang, atau ketiga wilayah itu bertautan menjadi suatu kombinasi aktivitas, atau menjadi kompleks secara terus-menerus diantara aktivitas-aktivitas dalam satu wilayah dan tuntutan-tuntutan dari wilayah lain (Awalya, 1995: 32).

Mencapai suatu pemahaman, diperlukan adanya pengetahuan dan keterampilan dari seorang konselor. Pengetahuan yang mendalam dimiliki oleh konselor berkenaan dengan teori yang mendasari suatu permasalahan yang ingin diketahui. Keterampilan pada umumnya memiliki keterkaiatan dengan adanya

praktik. Konselor yang terampil adalah konselor yang memenuhi karakteristik kompetensi konselor dalam melaksanakan tugas. Karakteristik konselor yang diperlukan dalam pemahaman itu menurut Brammer, mengarah pada efektifitas yang berwujud emphaty, hangat dan penuh perhatian (warmth and caring), terbuka (openess), penghargaan secara positif (positive regard), dan kekonkritan dan kekhususan (concreteness and specifity) (dalam Awalya, 1995: 27).

Pendapat lain menungkapkan beberapa karakteristik yang harus dimiliki konselor untuk dapat memahami, diantaranya:

a. Rogers, menekankan penghargaan dan penerimaan yang tidak bersyarat apapun dan empati atau pengertian terhadap pengalaman, pikiran, perasaan. Keserasian yang berarti bahwa konselor menyadari reaksi-reaksi dalam batinnya sendiri.
b. Truax dan Carkhuff, mengemukakan pengertian terhadap konseli yang dikomunikasikan juga kepada konseli secara jelas, perhatian kepada konseli yang tidak membuat konseli menggantungkan diri pada konselor, konselor ikhlas berarti tidak berpura-pura atau bersandiwara.
c. Tyler, menyebut dua sikap dasar yaitu penerimaan kepada konseli dan pengertian atau pemahaman, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan kepada konseli apa yang ditangkap oleh konselor mengenai pikiran dan perasaan konseli.
d. Shertzer & Stone menyatakan bahwa penerimaan dan pengertian atau pemahaman yang kedua-duanya dapat dipandang sebagai sikap dasar atau sebagai keterampilan khusus.

2.1.2. Pengertian Konselor

Kata konselor menegaskan petugas pelaksana pelayanan konseling. Sebutan pelaksana pelayanan ini telah berkembang, yaitu dari tenaga penyuluh, tenaga BP, guru BP/BK, guru pembimbing, dan sekarang menjadi konselor. Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang konselor jika berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata 1 (S1) dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB), Bimbingan Konseling (BK), atau Bimbingan Penyuluhan (BP) (http://wikipedia.org).

"Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling, yang memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling" (Prayitno, 2004: 6). Dijelaskan juga bahwa "konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan Bimbingan dan Konseling" (Winkel, 2005: 167).

Dari beberapa pengertian konselor yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa konselor adalah seseorang yang mempelajari konseling dan secara profesional dapat melaksanakan pelayanan konseling dengan berlatar belakang pendidikan minimal S1 Jurusan BK. Pelayanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor, salah satunya adalah layanan konsultasi BK. Dalam layanan konsultasi BK, seorang konselor harus mampu mengembangkan WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap) konsulti.

2.1.3. Kualitas Pribadi Konselor

Pelayanan bimbingan dan konseling diminati oleh orang yang menghendaki kondisi hidup yang membahagiakan. Pelayanan ini dikatakan profesional apabila dilakukan oleh seorang konselor yang berkualitas. Kualitas seorang konselor salah satunya dapat dinilai dari pribadinya. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh.

Beberapa ahli mengungkapkan karakteristik konselor yang menunjang kualitas pribadi konselor. Menne (dalam Willis, 2004: 80) menyebutkan ’kualitas pribadi konselor yaitu: 1) memahami dan melaksanakan etika profesional, 2) mempunyai rasa kesadaran diri mengenai kompetensi, nilai, dan sikap, 3) memiliki karakteristik diri yaitu respek terhadap orang lain, kematangan pribadi, memiliki kemampuan intuitif, fleksibel dalam pandangan dan emosional stabil, 4) kemampuan dan kesabaran untuk mendengarkan orang lain dan kemampuan berkomunikasi’.

Belkin (dalam Winkel, 2005: 184) menyajikan sejumlah ’kualitas kepribadian konselor yaitu 1) mengenal diri sendiri *(knowing oneself)*, 2) memahami orang lain *(understanding others)*, 3) kemampuan berkomunikasi dengan orang lain *(relating to others)*’. Mengenal diri sendiri berarti konselor menyadari keunikan diri sendiri, mengetahui kelemahan dan kelebihannya, dan usaha apa yang dilakukan agar dia dapat berhasil. Memahami orang lain menuntut keterbukaan hati dan kebebasan dari cara berpikir kaku dari konselor. Untuk

kemampuan berkomunikasi dengan orang lain mengharuskan seorang konselor dapat memahami dan menghargai orang lain.

2.1.4. Sikap dan Keterampilan Konselor

Sikap tidak dapat dilihat bentuknya secara langsung, sedangkan keterampilan dapat tampak wujudnya dalam perbuatan seseorang. Menurut Mappiare (2004: 98-116) ”sikap dasar konselor meliputi penerimaan, pemahaman, dan kesejatian dan keterbukaan”. Ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

(1) Penerimaan, yaitu penerimaan konselor terhadap keunikan pribadi orang lain.

(2) Pemahaman, yaitu kesadaran konselor untuk memahami tingkah laku, fikiran, dan perasaan orang lain.

(3) Kesejatian dan keterbukaan, yaitu keselarasan antara pikiran dengan apa yang diucapkan, konselor juga harus jujur dengan semua hal yang menyangkut hubungan konselor dengan kliennya.

Keterampilan konselor meliputi kompetensi intelektual, kelincahan karsa-cipta, dan pengembangan keakraban. Diuraikan sebagai berikut:

(1) Kompetensi intelektual, keterampilan komunikasi yang baik oleh konselor dapat membantu proses interviu.

(2) Kelincahan karsa-cipta, yaitu konselor tidak kaku, tanggap terhadap perubahan-perubahan sikap, persepsi dan ekspektasi.

(3) Pengembangan keakraban, yaitu konselor bertanggungjawab menciptakan, memantapkan dan melanggengkan suasana akrab agar terjadi hubungan keterbukaan.

2.2 Layanan konsultasi

2.2.1. Kedudukan Layanan Konsultasi Dalam Bimbingan dan Konseling Pola-17 Plus

Sejak tahun 1993 penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) memperoleh perbendaharaan istilah baru yaitu *BK Pola-17*. Hal ini memberi warna tersendiri bagi arah bidang, jenis layanan dan kegiatan pendukung BK di jajaran pendidikan dasar dan menengah. Pada Abad ke-21, BK Pola 17 itu berkembang menjadi *BK Pola-17 Plus*. Kegiatan BK ini mengacu pada sasaran pelayanan yang lebih luas, diantaranya mencakup semua peserta didik dan warga masyarakat.

Layanan konsultasi merupakan salah satu jenis layanan dari BK Pola-17 *Plus*. Layanan konsultasi dan layanan mediasi merupakan layanan hasil pengembangan dari BK Pola 17 *Plus*. Dengan adanya pengembangan layanan ini, maka layanan konsultasi dan layanan mediasi secara otomatis menjadi bidang tugas konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling, khususnya pelayanan BK di sekolah.

Menurut Prayitno (2004: i-ii) butir-butir pokok BK Pola-17 *Plus* adalah sebagai berikut:

A. Keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas, serta landasan BK
B. Bidang Pelayanan BK, meliputi:
   B.1. Bidang pengembangan pribadi
   B.2. Bidang pengembangan sosial
   B.3. Bidang pengembangan kegiatan belajar
   B.4. Bidang pengembangan karir
   B.5. Bidang pengembangan kehidupan berkarya
   B.6. Bidang pengembangan kehidupan keberagamaan
C. Jenis layanan BK, meliputi:
   L.1. Layanan Orientasi

L.2. Layanan Informasi
L.3. Layanan Penempatan dan Penyaluran
L.4. Layanan Penguasaan Konten
L.5. Layanan Konseling Perorangan
L.6. Layanan Bimbingan Kelompok
L.7. Layanan Konseling Kelompok
L.8. Layanan Konsultasi
L.9. Layanan Mediasi

D. Kegiatan pendukung BK, meliputi:
   P.1. Aplikasi Instrumentasi
   P.2. Himpunan Data
   P.3. Konferensi Kasus
   P.4. Kunjungan Rumah
   P.5. Alih Tangan Kasus
E. Format pelayanan:
   1. Format Individual
   2. Format Kelompok
   3. Format Klasikal
   4. Format Lapangan
   5. Format ”Politik”

Melihat uraian tentang BK Pola-17 *Plus*, pada penelitian ini hanya membatasi sesuai dengan judul penelitian. Peneliti hanya menguraikan salah satu jenis layanan BK yaitu layanan konsultasi.

2.2.2. Pengertian Layanan Konsultasi BK

Menurut Prayitno (2004: 1), ”layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan (konsulti) yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga”. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap dua orang konsulti atau lebih kalau konsulti- konsulti itu menghendakinya.

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 6) dijelaskan bahwa ”layanan konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak

lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik".

Dalam program bimbingan di sekolah, Brow dkk (dalam Marsudi, 2003: 124) menegaskan bahwa 'konsultasi itu bukan konseling atau psikoterapi sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada siswa (klien), tetapi secara tidak langsung melayani siswa melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain'.

Layanan konsultasi juga didefinisikan bantuan dari konselor ke klien dimana konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti, membahas tentang masalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya anak, murid atau orangtuanya. Bantuan yang diberikan untuk memandirikan konsulti sehingga ia mampu menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkannya (http://konseling indonesia.com).

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan penulis bahwa layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga (konseli yang bermasalah). Pada layanan konsultasi, dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap konsultasi yang dilakukan oleh konselor kepada konsulti, dan tahap penanganan yang dilakukan oleh konsulti kepada konseli/pihak ketiga. Maka petugas pada tahap konsultasi adalah konselor, sedangkan petugas pada tahap penanganan adalah konsulti.

2.2.3. Tujuan Layanan Konsultasi BK

Pada dasarnya setiap kegiatan tidak akan terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. ”Tujuan diberikannya bantuan yaitu supaya orang-perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas” (Winkel, 2005: 32). Layanan konsultasi merupakan bagian dari layanan Bimbingan dan Konseling, maka tujuan dari layanan ini sepenuhnya akan mendukung dari tercapainya tujuan BK.

Fullmer dan Bernard (dalam Marsudi, 2003: 124-125) merumuskan tujuan layanan konsultasi sebagai bagian tujuan bimbingan di sekolah adalah sebagai berikut:

(1) Mengambangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, dan administrator sekolah.
(2) Menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang yang penting.
(3) Mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar.
(4) Memperluas layanan dari para ahli.
(5) Memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrator.
(6) Membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku.
(7) Menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik.
(8) Menggerakkan organisasi yang mandiri.

Tujuan layanan konsultasi sebagaimana dikemukakan oleh Prayitno (2004: 2) adalah:

(1) Tujuan umum
Layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya sebahagian menjadi tanggung jawab konsulti.

(2) Tujuan khusus
Kemampuan sendiri yang dimaksudkan diatas dapat berupa wawasan, pemahaman dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak terkait itu (fungsi pemahaman). Dengan kemampuan sendiri itu konsulti akan melakukan sesuatu (sebagai bentuk langsung dari hasil konsultasi) terhadap pihak ketiga. Dalam kaitan ini, proses konsultasi yang dilakukan konselor di sisi yang pertama, dan proses pemberian bantuan atau tindakan konsulti terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua, bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga (fungsi pengentasan).

Demikian juga Dougherty (dalam Sciarra, 2004: 55) mengungkapkan ’tujuan konsultasi, yaitu : (1) *The goal of all consulting is to solve problems* (2) *Another goal of consulting is to improve the consultee’s work with the client and, in turn, improve the welfare of the clien*’. Dari ungkapan tersebut dijelaskan bahwa tujuan konsultasi adalah mengatasi masalah dan konsultasi untuk meningkatkan kerja konsulti kepada konseli yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan konseli.

2.2.4. Komponen Layanan Konsultasi BK

Dari definisi layanan konsultasi, dijelaskan bahwa dalam proses konsultasi akan melibatkan tiga pihak, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga/konseli. Hal ini seperti pendapat Dougherty (dalam Sciarra, 2004: 55) *’consulting is tripartite: it involves a consultant, a consultee, and a client’* (Berkonsultasi meliputi tiga pihak yaitu melibatkan seorang konsultan, konsulti, dan konseli). Ketiga pihak ini disebut sebagai komponen layanan konsultasi. Ketiga komponen layanan konsultasi tersebut menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan. Dijelaskan oleh Prayitno (2004: 3-4), bahwa:

> Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling, salah satu diantaranya adalah layanan konsultasi; Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang (setidak-tidaknya sebahagian) menjadi tanggung jawabnya. Bantuan itu diminta dari konselor karena konsulti belum mampu menangani situasi dan atau permasalahan pihak ketiga itu; Pihak ketiga adalah individu (atau individu-individu) yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi/ permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konsulti merasa (setidak-tidaknya ikut) bertanggung jawab atas pengentasannya.

Marsudi (2003: 124-125) menyebutkan bahwa layanan konsultasi mengandung beberapa aspek, yaitu:

(1) Konsultan, yaitu seseorang yang secara profesional mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan kepada konsulti dalam upaya mengatasi masalah klien.
(2) Konsulti, yaitu pribadi atau seorang profesional yang secara langsung memberikan bantuan pemecahan masalah terhadap klien.
(3) Klien, yaitu pribadi atau organisasi tertentu yang mempunyai masalah.
(4) Konsultasi merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung.

Dalam layanan konsultasi ini dapat diperjelas bahwa penanganan masalah yang dialami konseli (pihak ketiga) dilakukan oleh konsulti. Konsulti akan dikembangkan kemampuannya oleh konselor pada saat tahap konsultasi berlangsung, yaitu mengembangkan pada diri konsulti tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Akhir proses konsultasi ini adalah konselor menganggap bahwa konsulti mampu membantu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang setidaknya menjadi tanggung jawabnya.

Konsulti adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dialami pihak ketiga. Misalnya orang tua, guru, kepala sekolah, kakak, dan sebagainya. Seorang konsulti harus bersedia membantu penyelesaian masalah pihak ketiga. Menurut Sciarra (2004: 55) "*also, collaboration between consultant and consultee is especially important in the school setting because it eases the burden on the consultant"* (kerjasama antara konsultan dan konsulti menjadi yang terpenting di sekolah sebab dapat meringankan beban konsultan).

2.2.5. Asas Layanan Konsultasi BK

Munro, dkk (dalam Prayitno, 2004: 5) menyebutkan 'ada tiga etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri (kemandirian)'. Etika dasar ini terkait langsung dengan asas konseling. Asas ini juga berlaku pada layanan konsultasi. Ketiga asas ini diuraikan sebagai berikut:

(1) Asas kerahasiaan

Seorang konselor diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, dengan harapan adanya kepercayaan dari semua pihak maka mereka akan memperoleh manfaat dari pelayanan BK. Oleh karena itu, Mugiarso (2004: 24) mengemukakan bahwa "asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam usaha BK, dan harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab". Asas kerahasiaan pada layanan konsultasi yang dimaksudkan adalah menyangkut jaminan kerahasiaan identitas konsulti dan pihak ketiga, dan jaminan kerahasiaan terhadap permasalahan yang dialami pihak ketiga.

(2) Asas kesukarelaan

Kesukarelaan yang dimaksudkan pada layanan konsultasi adalah kesukarelaan dari konselor dan konsulti. Konselor secara suka dan rela membantu konsulti untuk membantu mengarahkan bantuan pemecahan masalah yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Kesukarelaan konsulti yaitu bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor, dan kemudian terbuka mengemukakan hal-hal yang terkait dengan konsulti sendiri dan pihak ketiga dengan tujuan agar permasalahan yang dialami pihak ketiga segera terselesaikan.

(3) Asas kemandirian

”Pada layanan konsultasi, konsulti diharapkan mencapai tahap-tahap kemandirian berikut: (1) memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, (2) memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis, (3) mengambil keputusan secara positif dan tepat, (4) mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, (5) mewujudkan diri sendiri” (Prayitno, 2004: 8-9).

2.2.6. Operasionalisasi Layanan Konsultasi BK

Layanan konsultasi merupakan suatu proses, sehingga dalam pelaksanaannya menempuh tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap pelaksanaan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Langkah-langkah tersebut menurut Prayitno (2004: 30-31) adalah sebagai berikut:

2.2.6.1. Perencanaan

2.2.6.1.1. Mengidentifikasi konsulti
2.2.6.1.2. Mengatur pertemuan
2.2.6.1.3. Menetapkan fasilitas layanan
2.2.6.1.4. Menyiapkan kelengkapan administrasi

2.2.6.2. Pelaksanaan

2.2.6.2.1. Menerima konsulti
2.2.6.2.2. Menyelenggarakan penstrukturan konsultasi
2.2.6.2.3. Membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga
2.2.6.2.4. Mendorong dan melatih konsulti untuk : mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada
2.2.6.2.5. Membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling
2.2.6.2.6. Melakukan penilaian segera

2.2.6.3. Evaluasi

Melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaan hasil konsultasi.

2.2.6.4. Analisis Hasil Evaluasi

Menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri pihak ketiga dan konsultasi sendiri.

2.2.6.5. Tindak Lanjut

Konsultasi lanjutan dengan konsulti untuk membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan lebih lanjut.

Langkah-langkah layanan konsultasi dijelaskan sebagai berikut:

2.2.6.1. Perencanaan

Langkah awal sebelum pelaksanaan layanan, terlebih dahulu konselor melakukan perencanaan. Perencanaan dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaksanaan. Perencanaan layanan konsultasi meliputi:

2.2.6.1.1. Mengidentifikasi konsulti

Layanan konsultasi melibatkan pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga/ konseli. Pihak terkait inilah yang disebut konsulti. Pada pelayanan Bimbingan dan Konseling khususnya di sekolah, pihak

yang disebut sebagai konsulti adalah sesama konselor, guru bidang studi atau wali kelas, pejabat struktural, orang tua atau saudara dari siswa, dan petugas administrator.

Dalam mengidentifikasi konsulti, tindakan dari seorang konselor adalah mengenal konsulti dengan maksud memperoleh data yang dibutuhkan konselor. Identifikasi dapat dilakukan dengan wawancara dan *rapport.* ”Rapport adalah suatu hubungan *(relationship)* yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan, dan saling tarik menarik” (Willis, 2004: 46). Untuk menciptakan rapport, konselor harus memiliki sikap empati, mampu membaca perilaku nonverbal, bersikap akrab dan berniat memberikan bantuan tanpa pamrih.

2.2.6.1.2. Mengatur pertemuan

Mengatur pertemuan atau melakukan kontrak yang artinya perjanjian antara konselor dengan konsulti. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, terjadi kesepakatan kontrak waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi. Penyelenggaraan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk kenyamanan dan jaminan kerahasiaan proses konsultasi.

2.2.6.1.3. Menetapkan fasilitas layanan

Fasilitas dalam layanan konsultasi adalah segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan layanan konsultasi. Fasilitas yang ditetapkan tersebut misalnya tempat konsultasi yang menimbulkan perasaan nyaman, buku agenda konselor yang berisi janji pertemuan dengan konsulti, alat perekam yang tidak diketahui oleh konsulti.

2.2.6.1.4. Menyiapkan kelengkapan administrasi

Sebelum konselor dan konsulti melakukan layanan konsultasi, maka perlu adanya kesiapan kelengkapan administrasi layanan. Adanya pengadministrasian dimaksudkan agar terdapat bukti adanya pelaksanaan layanan konsultasi. Misalnya konselor menyiapkan buku catatan hasil wawancara dengan konsulti, terdapat jurnal harian pelaksanaan layanan.

2.2.6.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan bagian inti dari layanan konsultasi. ”Pada tahap pelaksanaan, pernyataan masalah diungkapkan, hubungan konsultan dan peranannya dirumuskan dan peraturan pokok dikembangkan” (Marsudi, 2003: 125). Pada layanan konsultasi, proses layanan dilakukan dua tahap. Yaitu pertama proses konsultasi antara konselor dan konsulti, dan yang kedua proses penanganan oleh konsulti terhadap pihak ketiga yang memiliki masalah. Secara jelas tahap ini meliputi:

2.2.6.2.1. Menerima konsulti

Penerimaan konsulti oleh konselor sangat mempengaruhi perkembangan proses layanan konsultasi selanjutnya. Hal ini dikarenakan alasan bahwa dengan penerimaan yang baik oleh konselor, maka akan membuat kenyamanan konsulti dan pada akhirnya membantu kelancaran layanan konsultasi. Menurut Winkel (2005: 473) menyebutkan bahwa ”bila bertemu dengan konseli untuk pertama kali: menyambut kedatangan konseli dengan sikap ramah, misalnya berjabatan tangan, mempersilakan duduk, dan menyisihkan berkas-berkas yang ada di atas meja kerjanya”. Demikian halnya yang dilakukan oleh konselor terhadap konsulti

bahwa konselor bersikap menerima konsulti baik secara verbal maupun non verbal. Semua hal itu dilakukan dengan tujuan berpengaruh terhadap keberhasilan layanan.

Menerima konseli secara verbal merupakan tanggapan verbal konselor yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan atau ungkapan verbal secara sopan dan santun. Misalnya menerima konsulti dengan ucapan *selamat siang* pada awal konsultasi, menggunakan pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan, tidak berlebih dalam berbicara, dan sebagainya. Penerimaan non verbal merupakan reaksi atau tanggapan yang dibedakan dari berbahasa dengan memakai kata-kata, misalnya eksprasi wajah, sikap tubuh, anggukan kepala, dan sebagainya.

2.2.6.2.2. Menyelenggarakan penstrukturan konsultasi

Penstrukturan layanan konsultasi diperlukan untuk membawa konsulti mulai memasuki layanan konsultasi. Bagi konsulti yang baru pertama kali melakukan layanan konsultasi, maka diperlukan penstrukturan secara keseluruhan. Untuk memulai proses konultasi, terlebih dahulu diawali dengan wawancara permulaan. Menurut Tyler (dalam Gunarsa, 2007: 93) mengemukakan bahwa:

> Dari sudut konselor ada tiga tujuan pada wawancara permulaan dalam kaitan dengan proses konseling ialah: (1) menimbulkan suasana bahwa proses konseling dimulai, (2) membuka aspek-aspek psikis pada diri klien seperti kehidupan perasaan dan sikapnya, (3) menjelaskan struktur mengenai proses bantuan yang akan diberikan.

Terdapat tiga teknik dasar strukturing atau pembatasan diantaranya pembatasan pada lama pertemuan, pembatasan masalah yang dibahas, dan pembatasan pada peran masing-masing konselor atau konsulti. Pada layanan konsultasi, terdapat penyelenggaraan penstukturan konsultasi yang harus

dipahami oleh konselor dan konsulti. Penstrukturan ini diperlukan dengan tujuan agar terjadi kejelasan arah konsultasi yaitu dengan adanya pemahaman tentang pembatasan waktu konsultasi, pembatasan masalah apa yang dibahas, dan peranan keduanya akan membantu melancarkan kesuksesan layanan konsultasi.

2.2.6.2.3. Membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga

”Seperti untuk layanan konseling perorangan, materi yang dibahas dalam layanan konsultasi tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu oleh konselor, melainkan akan dikemukakan oleh konsulti ketika layanan berlangsung” (BSNP, 2006: 24). Masalah yang dibahas oleh konsulti adalah masalah yang dialami oleh pihak ketiga, baik itu permasalahan pribadi, sosial, belajar atau karir.

2.2.6.2.4. Mendorong dan melatih konsulti untuk :

(1) Mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga

Tugas konselor sebagai konsultan adalah membekali konsulti memperoleh WPKNS konsulti (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap) agar dapat bertindak membantu penyelesaian masalah pihak ketiga. WPKNS konsulti diuraikan sebagai berikut:

a. Wawasan.

Meliputi wawasan konsulti tentang diri pihak ketiga, permasalahan pihak ketiga, dan lingkungan pihak ketiga. Wawasan yang dipahami oleh konsulti terhadap pihak ketiga, sejalan dengan fungsi pemahaman Bimbingan dan Konseling. Seperti yang diungkapkan oleh Mugiarso (2004: 28) bahwa ”pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta

permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu klien, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien".

b. Pengetahuan.

Yaitu konsulti perlu memiliki pengetahuan tentang diri pihak ketiga, permasalahan pihak ketiga, ataupun lingkungan pihak ketiga yang pembahasannya dikaitkan dengan kaidah pendidikan, psikologi, sosial, ekonomi, budaya, dll.

c. Keterampilan.

Konsulti perlu menguasai berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Menurut Prayitno (2004: 19) bahwa "Keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan terhadap pihak ketiga adalah aplikasi alat-alat pendidikan, tiga-m, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubahan tingkah laku, seperti pemberian informasi dan contoh, latihan sederhana, dan pemberian nasihat secara tepat".

d. Nilai.

Konsultan perlu mengembangkan nilai-nilai pada diri konsulti dengan tujuan agar konsulti juga dapat memandang pihak ketiga berdasarkan nilai-nilai di kehidupan masyarakat. Misalnya nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai moral, dan lain sebagainya.

e. Sikap.

Sikap merupakan suatu respon yang dihasilkan dari stimulus. Seorang konsulti pada layanan konsultasi perlu mengembangkan sikap positif dan

dinamis *(developmental)* terhadap diri pihak ketiga dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu. Dengan adanya nilai dan sikap tersebut, diharapkan hubungan konsulti dan pihak ketiga semakin kondusif.

(2) Memanfaatkan sumber-sumber yang ada

Konsulti dalam membantu penyelesaian masalah pihak ketiga dapat memanfaatkan berbagai sumber bantuan. Pengumpulan informasi-informasi mengenai pihak ketiga dapat diperoleh dari pihak ketiga itu sendiri ataupun lingkungan dekat pihak ketiga, misalnya keluarga, teman bermain, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan diperoleh dari media cetak atau elektronik. Pemberian informasi dari pihak yang terkait dengan pihak ketiga tersebut dikumpulkan dengan alasan untuk membantu menjelaskan masalah dan juga membantu tercapainya penyelesaian masalah pihak ketiga.

2.2.6.2.5. Membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling

Pada proses konsultasi, konselor mengembangkan WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap) konsulti terkait dengan penyelesaian masalah pihak ketiga. Tugas konselor selanjutnya adalah melakukan persetujuan dengan konsulti agar konsulti bersedia membantu penyelesaian masalah pihak ketiga. Langkah penyelesaian masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti dengan menggunakan bahasa dan cara-cara konseling yang telah diperoleh konsulti dari pengembangan WPKNS nya. Dapat dikatakan bahwa konsulti bukanlah menjadi seorang konselor. Hal yang dimaksudkan konsulti dapat menggunakan bahasa dan cara-cara konseling, misalnya konsulti dapat menggunakan pertanyaan terbuka kepada pihak ketiga, konsulti melakukan

penerimaan pihak ketiga dengan bahasa verbal dan non verbal, dalam hal mengambil keputusan, dan lain-lain.

Penanganan pihak ketiga oleh konsulti tidak terlepas dari pantauan dari konselor. Pada tahap ini bisa terjadi kemungkinan alternatif pemecahan masalah pihak ketiga gagal dilakukan oleh konsulti, sehingga perlu dilakukan kembali atau dengan intervensi yang berbeda. Penghentian layanan konsultasi tidak berbeda dengan layanan konseling perorangan. ”Menghentikan konseling (terminasi) bisa dilakukan untuk sementara dan selama itu konseli masih bisa berhubungan kembali kalau dibutuhkan atau dihentikan sama sekali karena tujuan konseling sudah tercapai” (Gunarsa, 2007: 99).

2.2.6.2.6. Melakukan penilaian segera

Akhir setiap kegiatan layanan terdapat adanya suatu penilaian layanan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan yang telah dicapai dari proses pelaksanaan layanan. Terhadap hasil layanan konsultasi perlu dilaksanakan tiga jenis penilaian, yaitu penilaian segera *(laiseg)*, penilaian jangka pendek *(laijapen)*, dan penilaian jangka panjang *(laijapang)*.

Penilaian segera dari layanan konsultasi dilaksanakan pada akhir setiap konsultasi yang dilakukan oleh konselor dan konsulti. Fokus penilaian segera layanan konsultasi adalah menilai diri konsulti berkenaan dengan ranah *Understanding, Comfort, dan Action* (UCA). Ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

(1) *Understanding* – U

Tahap pertama pada layanan konsultasi adalah proses konsultasi antara konselor/konsultan dengan konsulti. Hasil dari tahap ini salah satunya adalah adanya pemahaman baru yang diperoleh konsulti. Pemahaman konsulti meliputi pemahaman tentang WPKNS nya, pemahaman permasalahan pihak ketiga yang dibahas, penyebab munculnya permasalahan, sampai pada pemahaman konsulti tentang langkah penanganan yang telah diajarkan konselor.

(2) *Comfort* – C

Selain menilai pemahaman konsulti pada proses konsultasi, konselor juga menilai perasaan yang berkembang pada diri konsulti. Pada penilaian segera ini, konselor menanyakan apakah konsulti merasa terbebani atau ketidaknyamanan terhadap konsultasi yang dilakukan atau terjadi sebaliknya.

(3) *Action* – A

Setelah menilai tentang pemahaman dan perasaan konsulti, menilai kegiatan apa yang akan dilaksanakan konsulti setelah proses konsultasi selesai perlu dilakukan oleh konselor. Penilaian segera tentang *action* dilakukan dengan cara menanyakan kepada konsulti tentang rencana kegiatan apa yang akan dilaksanakan pasca konsultasi dalam rangka mewujudkan upaya pengentasan masalah yang dialami pihak ketiga.

2.2.6.3. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan pada layanan konsultasi adalah melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaan hasil konsultasi. Laijapen dilakukan setelah konsulti memberikan penanganan kepada pihak ketiga (tahap

penanganan). Penilaian jangka pendek mengacu pada bagaimana konsulti melakukan unsur kegiatan atau *action* dari hasil proses konsultasi. Sasaran laijapen ini adalah respon atau dampak awal pihak ketiga terhadap tindakan penanganan yang dilakukan oleh konsulti. Dengan demikian konsulti juga terlebih dahulu telah dilatih oleh konselor agar dapat melakukan penilaian segera kepada pihak ketiga.

Pada penilaian jangka panjang (laijapang) yang menjadi fokusnya adalah terjadi perubahan pada diri pihak ketiga. Perubahan yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang sejak awal dikonsultasikan. Untuk melihat ada tidaknya perubahan pada diri pihak ketiga, maka konsulti juga dibekali konsultan agar dapat melakukan penilaian kepada pihak ketiga.

2.2.6.4. Analisis Hasil Evaluasi

Analisis hasil evaluasi yaitu menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri pihak ketiga dan konsulti sendiri. Tujuan utama dari analisis hasil evaluasi layanan konsultasi adalh untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan penanganan masalah pihak ketiga. Hubungan konsulti dengan konsultan tidak kontinu, tetapi efek dari proses diharapkan kontinu. ”Putusan dibuat untuk menunda aktivitas, mendesain kembali dan melaksanakan ulang atau berhenti secara penuh” (Marsudi, 2003: 126).

2.2.6.5. Tindak Lanjut

Hasil penilaian digunakan sebagai pertimbangan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan konsultasi lanjutan, penghentian atau alih tangan *(refferal).* Konsultasi lanjutan dilakukan berdasarkan kesepakatan kembali antara konsulti

dan konsultan. Konsultasi ini diperlukan jika tahap penanganan dikatakan belum berhasil. Tingkah laku pihak ketiga yang diharapkan oleh konsulti belum tercapai dan konsulti merasa perlu untuk mengulang kembali penanganan kepada pihak ketiga yang bermasalah.

Penghentian layanan konsultasi tidak berbeda dengan layanan konseling perorangan. ”Menghentikan konseling (terminasi) bisa dilakukan untuk sementara dan selama itu klien masih bisa berhubungan kembali kalau dibutuhkan atau dihentikan sama sekali karena tujuan konseling sudah tercapai” (Gunarsa, 2007: 99). Jika diperlukan, alih tangan atau *refferal* juga merupakan bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan.

2.3 Pemahaman konselor tentang layanan konsultasi

Konseling sebagai suatu profesi memiliki kompetensi utama minimal profesi konseling, diantaranya Kompetensi Pengembangan Kepribadian (KPK), Kompetensi Landasan Keilmuan dan Keterampilan (KKK), Kompetensi Keahlian Berkarya (KKB), Kompetensi Perilaku Berkarya (KPB), dan Kompetensi Berkehidupan Bermasyarakat Profesi (KBB). Memahami dan mempraktikkan jenis-jenis layanan konseling termasuk dalam KKB.

Menurut Miller (Awalya, 1995: 10) mengemukakan bahwa fungsi utama konselor adalah mengimplementasikan berbagai layanan program bimbingan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu layanan dalam konseling adalah layanan konsultasi. Jadi mengimplementasikan layanan konsultasi merupakan tugas bagi konselor sekolah. Untuk mencapai ketercapaian pelaksanaan layanan

konsultasi, sebelumnya konselor perlu terlebih dahulu memahami makna tentang layanan konsultasi. Hal tersebut sejalan dengan kompetensi yang harus dimiliki konselor yaitu Kompetensi Keahlian Berkarya (KKB).

Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti, mengingat, memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik. Pemahaman konselor dapat diperoleh dengan pengetahuan dan keterampilan. Berkaitan dengan layanan konsultasi, maka arah pengetahuan tentang layanan konsultasi yaitu tentang operasionalisasi layanan konsultasi. Operasionalisasi layanan konsultasi meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, dan tindak lanjut.

Konselor mengetahui bahwa layanan konsultasi dapat dilakukan minimal menyangkut tiga kondisi, yaitu hadapi satu pilihan atau beberapa pilihan dari tiga wilayah kehidupan, berkeinginan kuat terjadinya perubahan atau beberapa perubahan pribadi dalam satu atau lebih dari ketiga wilayah kehidupan, menjadi sangat bingung tentang bagaimana seharusnya mengorganisir memberi arti kehidupan dari satu atau lebih dari ketiga wilayah kehidupan.

Pemahaman konselor tentang layanan konsultasi diartikan bahwa, setelah konselor mendapatkan informasi tentang layanan konsultasi sebagai fase I, kemudian konselor mampu untuk mengingat informasi yang didapatkan (fase II), dan pada akhirnya diperoleh fase III yaitu telah memahami tentang langkah-langkah pelaksanaan layanan konsultasi yang tertib dan lengkap dan mampu untuk menjelaskan kembali apa yang telah dipahami.

Sebelum melakukan layanan konsultasi, akan lebih baik jika konselor terlebih dahulu telah memahami tentang operasionalisasi layanan konsultasi. Peranan pemahaman sangat penting bagi konselor dalam pelaksanaan layanan konsultasi. Adanya pemahaman konselor tentang layanan konsultasi, maka konselor dapat melaksanakan layanan konsultasi dengan baik dan kemungkinan hanya terjadi sedikit kesalahan dalam pelaksanaannya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini, dengan variabel yang sama. Penelitian pernah dilakukan oleh Sri Suharini dengan judul penelitian Efektifitas Layanan Konsultasi Kepada Orang Tua Dalam Meningkatkan Minat dan Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Gugus 1 Gondokusuman Yogyakarta.

Hasil penelitian ini adalah terbukti ada pengaruh yang signifikan pemberian layanan konsultasi kepada orang tua dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar matematika siswa kelas V SD N Gugus 1 Gondokusuman Yogjakarta, sehingga layanan konsultasi efektif digunakan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil analisis kuantitatif dari data skor *pre test* dan *post test paired* pengujian hipotesis dengan uji-t diperoleh t_{hitung} 7,160 > t_{tabel} 1,697 pada taraf signifikan 0,05. Dengan demikian prestasi belajar siswa sebelum perlakuan dan setelah perlakuan ada perbedaan yang signifikan.

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa jika konselor yang bertindak sebagai konsultan telah

memahami tentang layanan konsultasi, maka besar kemungkinan konselor atau konsultan dapat melakukan proses layanan konsultasi dengan tepat dan keberhasilan pelaksanaan layanan konsultasi akan tercapai.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan usaha yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Hal yang perlu diperhatikan adalah metode yang digunakan harus disesuaikan dengan objek penelitian dan tujuan yang akan dicapai, sehingga penelitian dapat mengarah, berjalan dengan baik dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka aspek-aspek yang dibahas dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul pada penelitian ini yaitu Studi Deskriptif Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi Bimbingan Dan Konseling Pada SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu” (Azwar, 2004: 7).

Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian yang diperoleh. Jenis penelitian deskriptif pada penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan tujuan penelitian, yaitu ingin mendapatkan informasi yang akurat tentang sejauh mana pemahaman konselor

tentang layanan konsultasi Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.

3.2. Variabel Penelitian

3.2.1. Identifikasi dan Hubungan Antar Variabel

Variabel merupakan salah satu komponen penting dalam suatu penelitian, karena memahami dan menganalisis setiap variabel membutuhkan kelincahan berpikir bagi peneliti. Menurut Arikunto (2006: 118), "variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian". Variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman konselor tentang layanan konsultasi. Variabel tersebut adalah variabel tunggal, sehingga tidak ada hubungan antar variabel, baik variabel yang mempengaruhi *(independent)* dan variabel yang dipengaruhi *(dependen).*

3.2.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

(1) Pemahaman Konselor

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mendapatkan makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh setelah mengetahui sesuatu.

(2) Layanan Konsultasi Bimbingan dan Konseling

Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga (konseli yang bermasalah).

(3) Pemahaman Konselor tentang Layanan Konsultasi BK

Pemahaman konselor tentang layanan konsultasi yaitu kemampuan konselor untuk memahami tentang langkah-langkah pelaksanaan layanan konsultasi yang tertib dan lengkap.

Pemahaman tentang tahap-tahap pelaksanaan layanan konsultasi BK yang dimaksudkan diantaranya: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi, (4) analisis hasil evaluasi, dan (5) tindak lanjut.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya" (Sugiyono, 2005: 55). Sedangkan menurut Arikunto (2006: 130) "populasi adalah keseluruhan subjek penelitian". Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konselor di SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 24 konselor. Adapun ciri-ciri populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

(1) Masih aktif sebagai konselor sekolah di SMP N Sub Rayon 03 Kota Semarang pada Tahun Pelajaran 2008/2009
(2) Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) dari jurusan Bimbingan dan Konseling
(3) Telah berpengalaman sebagai konselor sekolah selama minimal lima tahun masa kerja

"Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti" (Arikunto, 2006:131). Dilihat dari jumlah unit populasi *(total sampling)* terbatas jumlahnya, sehingga tidak dilakukan pengambilan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan subyek populasi yang berjumlah 24 konselor. Hal ini sesuai dengan pertimbangan penentuan sampel seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:134) yaitu "apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi".

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap, berikut ini disajikan tabel daftar jumlah konselor di SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang :

Tabel 3.1
Daftar Jumlah Konselor SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang
Tahun Pelajaran 2008/2009

No	Unit Kerja	Jumlah Konselor
1	SMPN 11	4
2	SMPN 12	4
3	SMPN 17	4
4	SMPN 21	4
5	SMPN 24	3
6	SMPN 26	2
7	SMPN 27	3
Total		**24**

Sebelum mengadakan penelitian, penulis melakukan uji coba instrumen kepada konselor dari SMP Swasta yang termasuk Sub Rayon 03 Kota Semarang. Digunakan konselor SMP Swasta pada Sub Rayon 03 Kota Semarang untuk uji coba instrumen dengan pertimbangan: konselor SMP Negeri terbatas jumlahnya, konselor di SMP swasta telah mengetahui adanya layanan konsultasi pada BK, termasuk dalam satu Sub Rayon sehingga informasi yang didapatkan berkaitan

dengan layanan BK dipandang sama. Berikut ini disajikan tabel daftar jumlah konselor di SMP Swasta Sub Rayon 03 Kota Semarang :

Tabel 3.2
Daftar Jumlah Konselor SMP Swasta Sub Rayon 03 Kota Semarang
Tahun Pelajaran 2008/2009

No	Unit Kerja	Jumlah Konselor
1	SMP EKA SAKTI	4
2	SMP HIDAYATULLAH	1
3	SMP SUDIRMAN	2
4	SMP MARDI SISWA	1
5	SMP KARTIKA III-2	2
6	SMP AL AZHAR 14	1
7	SMP TEUKU UMAR	3
8	SMP PERINTIS 29	1
9	SMP FRANSISKUS	2
10	SMP PERMATA BANGSA	1
11	SMP AL USWAH	2
Total		**20**

3.4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti dengan menggunakan metode yang tepat dan instrumen yang baku. “Di dalam kegiatan penelitian, cara memperoleh data dikenal sebagai metode pengumpulan data” (Arikunto, 2006: 149). Untuk itu digunakan teknik–teknik, prosedur serta alat yang dapat diandalkan karena baik buruknya suatu penelitian sebagian tergantung pada teknik–teknik pengumpulan data. Sedangkan “instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan sesuatu metode” (Arikunto, 2006: 149).

1) Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah angket. “Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui" (Arikunto, 2006: 151). Instrumen untuk metode angket adalah angket atau kuesioner.

Bentuk angket yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis angket tertutup dan langsung. "Yang dimaksud angket tertutup adalah angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih, sedangkan langsung artinya pernyataan diberikan kepada responden untuk menjawab tentang dirinya sendiri" (Arikunto, 2006: 128). Angket pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data pemahaman konselor tentang layanan konsultasi Bimbingan dan Konseling.

Menurut Arikunto (2006: 152) angket atau kuesioner memang mempunyai banyak keuntungan sebagai instrumen pengumpul data, yaitu :

a. tidak memerlukan hadirnya peneliti.
b. dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden.
c. dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing–masing dan menurut waktu senggang responden.
d. dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu–malu menjawab.
e. dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar–benar sama.

Di samping adanya keuntungan-keuntungan dari metode angket tersebut, terdapat juga kelemahan-kelemahannya yaitu :

a. responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi diberikan kembali kepadanya.
b. seringkali sukar dicari validitasnya.
c. walaupun dibuat anonim, kadang–kadang responden dengan sengaja memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur.
d. seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos.

e. waktu pengembaliannya tidak bersama–sama, bahkan kadang–kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat (Arikunto, 2006: 152)

Untuk mengatasi kelemahan–kelemahan angket atau kuesioner di atas, maka peneliti berusaha untuk menekan sekecil mungkin kelemahan-kelamahan tersebut, antara lain:

a. Memberikan petunjuk-petunjuk dengan singkat dan lengkap untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengisian angket agar responden dapat memberikan jawaban yang jujur.

b. Memberikan penjelasan sebelum menyebarkan angket sehingga responden bersedia mengisi angket tanpa adanya perasaan terpaksa.

c. Mengamati dan meneliti kembali jawaban yang telah diisi oleh responden agar tidak ada pertanyaan yang terlewati/belum dijawab.

2) Penyusunan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini adalah angket yang berupa seperangkat pernyataan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemahaman konselor tentang layanan konsultasi. Bentuk dan skor jawaban angket terdiri atas empat jawaban yaitu: sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Agar pernyataan ini dapat dianalisis menggunakan statistik maka ke empat kategori jawaban ini diletakkan pada kontinum yang bergerak dari 1 sampai 4. Cara penyekoran untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Cara Penyekoran Butir Item

No	Kategori jawaban positif	Skor	No	Kategori jawaban negatif	Skor
1	Sangat Setuju	4	1	Sangat Setuju	1
2	Setuju	3	2	Setuju	2
3	Kurang Setuju	2	3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	1	4	Tidak Setuju	4

Untuk mengatasi kecenderungan kebanyakan responden memilih jawaban setuju, maka dalam penyusunan butir pernyataan dibuat pernyataan positif dan pernyataan negatif. Adapun pengembangan kisi-kisi instrumen seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Pemahaman Konselor
Tentang Layanan Konsultasi BK

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Deskriptor	No Item	
				+	-
Pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK	1. pemahaman tentang perencanaan layanan konsultasi BK	1.1 mengidentifikasi konsulti	1.1.1. adanya keterkaitan konsulti dengan pihak ketiga	1-2	3
			1.1.2. melakukan wawancara dan rapport	4	5
		1.2 mengatur pertemuan	1.2.1. kesepakatan kontrak waktu dan tempat	6	7,8
		1.3 menetapkan fasilitas layanan	1.3.1. sarana penunjang layanan konsultasi	9	10
		1.4 menyiapkan kelengkapan administrasi	1.4.1. mencatat hasil konsultasi	11	12
	2. pemahaman tentang pelaksanaan	2.1. menerima konsulti	2.1.1. penerimaan secara verbal dan non verbal	13	14 15

	layanan konsultasi BK	2.2. menyelenggarakan penstrukturan konsultasi	2.2.1. pembatasan waktu	16	17
			2.2.2. pembatasan masalah	18	19
			2.2.3. pembatasan peran	-	20
		2.3. membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga	2.3.1. masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir konseli	21	22 23
		2.4. mendorong dan melatih konsulti menangani masalah pihak ketiga	2.4.1. membekali konsulti memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap	24 s/d 27	28 s/d 30
		2.5. mendorong dan melatih konsulti untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada	2.5.1. mengumpulkan informasi dari lingkungan konseli	31 32	33
		2.6. membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara-cara konseling	2.6.1. menentukan langkah penyelesaian masalah konseli	34 35	-
		2.7. melakukan penilaian segera	2.7.1. menilai konsulti atas pemahaman yang diperoleh setelah konsultasi	36	37
			2.7.2. menanyakan perasaan konsulti setelah konsultasi	38	39
			2.7.3. rencana kegiatan konsulti pasca konsultasi	40	41
	3. pemahaman tentang evaluasi layanan konsultasi	3.1. penilaian jangka pendek	3.1.1. respon awal konseli terhadap penanganan konsulti	42	43
		3.2. penilaian jangka panjang	3.2.1. perubahan diri	44	45

	Bimbingan dan Konseling		konseli yang dikehendaki konsulti sesuai hasil konsultasi		
	4. pemahaman tentang analisis hasil evaluasi BK	4.1. mempertimbangkan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan	4.1.1. keputusan menentukan diadakannya konsultasi lanjutan, penghentian konsultasi atau alih tangan	46	47
	5. pemahaman tentang tindak lanjut layanan konsultasi BK	5.1. terminasi layanan konsultasi	5.1.1. diadakan pengulangan penanganan masalah konseli	48	-
			5.1.2. penghentian konsultasi karena berhasil sesuai tujuan	49	50
			5.1.3. diperlukan alih tangan kasus/ refferal	51	52

3.5. Uji Instrumen

Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid serta reliabel atau belum, maka perlu dilakukan uji coba instrumen kepada subyek di luar sampel. Hasil uji coba instrumen akan dianalisis untuk diketahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

3.5.1. Validitas Angket

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid, berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur” (Sugiyono, 2005:267). Validitas sangat

penting karena tanpa instrumen yang valid, data atau penelitian akan memberikan kesimpulan yang bias. Berdasarkan cara pengujiannya, penelitian ini merupakan jenis validitas internal. Validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Rumus yang digunakan adalah rumus *Product Moment* oleh *Pearson* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien indek korelasi product moment
N = Jumlah subjek
$\sum X$ = Jumlah skor total variabel X
$\sum Y$ = Jumlah skor total variabel Y
$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor variabel X
$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor variabel Y (Arikunto, 2006: 170).

Setelah diperoleh harga r_{xy} selanjutnya di konsultasikan dengan nilai r_{tabel} apabila $r_{xy} \geq r_{tabel}$ maka soal dikatakan valid.

3.5.2. Reliabilitas Angket

"Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik" (Arikunto, 2006: 178). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha. Rumus Alpha digunakan karena skornya 1 - 4, rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum \sigma_b^{\,2}}{\sigma_t^{\,2}} \right\}$$

Keterangan :

r_{11} = Reliabilitas instrumen
k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
$\sum \sigma_b^{\,2}$ = Jumlah varians butir
σt^2 = Varians total (Arikunto, 2006: 196).

Dari hasil perhitungan reliabilitas kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai r_{tabel} apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka butir soal dikatakan reliabel.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara yang harus ditempuh untuk menguraikan data menurut unsur-unsur yang ada di dalamnya sehingga mudah dibaca dan diintepretasikan. Data yang terkumpul perlu diolah untuk diketahui kebenarannya sehingga diperoleh hasil yang meyakinkan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil pengukuran data penelitian berupa data kuantitatif yang akan dihitung dengan teknik deskriptif prosentase. Teknik analisis data deskriptif prosentase dimaksudkan untuk mengetahui status variabel, yaitu mendiskripsikan pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK yang disajikan melalui prosentase. Rumus yang digunakan:

% = n : N x 100

Keterangan :
% = Prosentase
n = Skor yang diperoleh
N = Jumlah seluruh skor (Ali, 1997: 186)

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK di SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Persiapan penelitian

Penelitian dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempersiapkan perizinan pelaksanaan penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Perizinan kemudian dilanjutkan kepada kepala SMP baik untuk pelaksanaan uji coba ataupun pelaksanaan penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK pada SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang adalah dengan alat ukur berupa angket.

Sebelum angket digunakan maka terlebih dahulu di uji cobakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas sebuah instrumen. Uji coba instrumen dilaksananakan pada tanggal 6 – 16 Januari 2009 dengan responden berjumlah 20 konselor dari 11 SMP Swasta di Sub Rayon 03 Kota Semarang. Uji coba dilakukan di luar populasi dan sampel dengan pertimbangan bahwa responden penelitian terbatas jumlahnya, SMP yang digunakan sebagai uji coba masih dalam satu wilayah Sub Rayon, dan konselor uji coba sudah mengetahui adanya layanan

konsultasi BK. Uji validitas dan reliabilitas angket dihitung dengan tingkat kepercayaan 95%, agar diperoleh kevalidan item angket lebih banyak. Hasil uji validitas dan reliabilitas angket dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil Uji Validitas

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur data dari variabel yang diteliti secara tepat. Hasil uji coba dianalisis validitasnya dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment*. Butir angket dinyatakan valid jika $r_{xy} \geq r_{\text{tabel}}$. Dari 56 butir pernyataan, diperoleh 4 butir yang tidak valid yaitu nomor 20, 28, 38 dan 52. Butir-butir pernyataan tersebut mempunyai koefisien korelasi yang kurang dari r_{tabel} pada α = 5 % dengan n= 20 yaitu 0,444. Selanjutnya butir pernyataan yang tidak valid tersebut tidak dilakukan perbaikan karena dari 52 pernyataan yang valid sudah mewakili masing–masing indikator dari variabel penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 76.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen tersebut cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen digunakan rumus *Alpha* dengan pertimbangan bahwa skor dalam penelitian ini merupakan rentangan dari 1 – 4. Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,964 $\geq$ 0,444 (r_{tabel} pada α = 5 % dengan n= 20) sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 80.

4.1.2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dapat dilaksanakan setelah diperoleh hasil uji coba angket penelitian. Penelitian dilakukan pada tujuh SMP Negeri di Sub Rayon 03 Kota Semarang pada tanggal 20 – 31 Januari 2009. Responden penelitian adalah jumlah konselor di SMP N Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 24 konselor. Instrumen yang digunakan pada penelitian adalah angket pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK, dengan jumlah 52 butir pernyataan.

4.1.3. Hasil Analisis Deskriptif Penelitian

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK di SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang. Hasil perhitungan analisis deskriptif prosentase pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK secara keseluruhan terinci pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Prosentase Pemahaman Konselor tentang Layanan Konsultasi BK pada SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009

No	Sub Variabel	%	Kriteria
1	Pemahaman tentang perencanaan layanan konsultasi BK	48,70	Rendah
2	Pemahaman tentang pelaksanaan layanan konsultasi BK	59,91	Rendah
3	Pemahaman tentang evalusai layanan konsultasi BK	51,30	Rendah
4	Pemahaman tentang analisis hasil evaluasi layanan konsultasi BK	59,38	Rendah
5	Pemahaman tentang tindak lanjut layanan konsultasi BK	51,04	Rendah
Pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK		**55,79**	**Rendah**

Dari tabel 4.1 dapat diuraikan bahwa pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK pada SMPN Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 termasuk dalam kriteria *rendah* yaitu menunjukkan 55,79 %. Hal ini memberikan makna bahwa konselor belum memahami tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam layanan konsultasi BK. Pemahaman konselor tentang langkah – langkah layanan konsultasi meliputi pemahaman konselor tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, dan tindak lanjut layanan konsultasi. Pemahaman konselor yang rendah tentang layanan konsultasi selanjutnya dapat dijelaskan pada deskripsi sub variabel sebagai berikut:

a. Sub Variabel Pemahaman Konselor Tentang Perencanaan Layanan Konsultasi BK

Pemahaman konselor tentang perencanaan layanan konsultasi BK tergolong *rendah* dengan prosentase 48,70 %. Hal ini berarti bahwa konselor belum mengetahui langkah awal kegiatan layanan konsultasi BK, yaitu meliputi mengidentifikasi konsulti, mengatur pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi.

Konselor belum memahami dalam hal mengidentifikasi konsulti, yang artinya konselor kurang paham dengan pihak yang disebut sebagai konsulti dan tindakan yang akan dilakukan setelah mengenal konsulti. Konselor masih memerlukan suatu penjelasan bahwa pada layanan konsultasi pengertian konsulti bukan hanya orang tua, konsulti adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dialami konseli. Di sekolah, sebagai konsulti misalnya sesama konselor, guru bidang studi atau wali kelas, pejabat struktural, orang tua atau saudara dari siswa, dan petugas

administrator. Konselor juga belum sepenuhnya mengerti cara mengenal konsulti dapat dilakukan dengan rapport dan wawancara.

Konselor belum memahami tentang menetapkan fasilitas layanan konsultasi yaitu sarana yang dapat menunjang ketercapaian layanan konsultasi. Fasilitas yang ditetapkan tersebut misalnya tempat konsultasi yang menimbulkan perasaan nyaman, kerapian tempat konsultasi, penataan kursi di ruang konsultasi, buku agenda konselor yang berisi janji pertemuan dengan konsulti, alat perekam yang tidak diketahui oleh konsulti (jika diperlukan).

Pemahaman konselor dalam hal mengatur pertemuan konsultasi dan untuk menyiapkan kelengkapan administrasi masih sangat rendah. Artinya bahwa konselor tidak memahami adanya pertemuan layanan konsultasi atas kesepakatan antara konselor dan konsulti, bukan sepihak. Kesepakatan yang dilakukan yaitu kesepakatan waktu dan kesepakatan tempat pelaksanaan. Konselor mengartikan bahwa pada layanan konsultasi, konselor mengundang orang tua konseli dengan surat panggilan dari sekolah yang telah ditentukan waktunya. Konselor juga tidak mengetahui bahwa mempersiapkan catatan hasil konsultasi adalah penting. Hal ini karena dengan adanya catatan pada pertemuan konsultasi dapat mempermudah konselor untuk mengingat dan membantu kelancaran tercapainya tujuan layanan.

b. Sub Variabel Pemahaman Konselor Tentang Pelaksanaan Layanan Konsultasi BK

Pemahaman tentang pelaksanaan layanan konsultasi BK memiliki prosentase 59,91 % dengan kriteria *rendah*. Hal ini memberikan makna bahwa konselor belum memahami dengan jelas tentang tahap pelaksanaan layanan konsultasi, yaitu dalam hal menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan konseli, mendorong dan melatih konsulti menangani masalah pihak krtiga, membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara konseling, dan melakukan penilaian segera.

Konselor belum memahami dalam menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, yang berarti bahwa konselor belum sepenuhnya mengerti adanya pembatasan waktu, pembatasan masalah, dan pembatasan peran pada layanan konsultasi. Penstrukturan perlu dipahami oleh konselor sebelum tahap konsultasi dengan tujuan agar terjadi kejelasan arah konsultasi yang akan dilakukan.

Kurangnya pemahaman konselor terdapat juga dalam membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan konseli. Hal ini mengandung pengertian bahwa konselor belum mengerti tahap konsultasi hanya dilakukan konselor kepada konsulti, bukan kepada konseli secara langsung. Layanan konsultasi juga diselenggarakan untuk membahas masalah konseli, baik masalah pribadi, sosial, belajar atau karir konseli.

Dalam mendorong dan melatih konsulti menangani masalah konseli, diperoleh pemahaman konselor yang rendah. Berarti bahwa konselor belum

memahami tugas konselor sebagai konsultan adalah membekali konsulti memperoleh WPKNS konsulti (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap) agar dapat bertindak membantu penyelesaian masalah pihak ketiga/ konseli.

Konselor kurang memahami dalam hal membina komitmen konsulti untuk menangani masalah konseli dengan bahasa dan cara-cara konseling. Artinya adalah konselor belum memahami bahwa pada layanan konsultasi, penanganan masalah dilakukan secara langsung oleh konsulti kepada konseli setelah konsulti melakukan tahap konsultasi kepada konselor. Penanganan masalah dilakukan oleh konsulti dengan menggunakan bahasa dan cara konseling, misalnya menggunakan pertanyaan terbuka kepada konseli, penggunaan bahasa verbal dan non verbal, cara mengambil keputusan, dan sebagainya.

Pemahaman konselor tentang penilaian segera paada layanan konsultasi termasuk dalam kriteria rendah. Hal ini menunjukkan bahwa konselor belum memahami penilaian segera pada layanan konsultasi yaitu menilai diri konsulti berkenaan dengan ranah *Understanding, Comfort, dan Action* (UCA). Konselor belum mengerti untuk melakukan penilaian terhadap konsulti atas pemahaman yang diperoleh setelah tahap konsultasi, menanyakan perasaan konsulti setelah konsultasi, dan menanyakan kegiatan yang akan dilakukan konsulti setelah konsultasi.

Pada indikator menerima konsulti, konselor memiliki pemahaman dalam kriteria tinggi. Hal ini bermakna bahwa konselor telah memahami

pelaksanaan layanan konsultasi yaitu pada cara menerima konsulti, baik dalam penerimaaan secara verbal ataupun non verbal. Hasil perhitungan pada indikator mendorong, melatih konsulti untuk memanfaatkan sumber yang ada, juga menunjukkan kriteria tinggi. Artinya konselor telah memahami bahwa perlu mengarahkan konsulti untuk mendapatkan informasi tentang pihak yang bermasalah dari lingkungannya.

c. Sub Variabel Pemahaman Konselor Tentang Evaluasi Layanan Konsultasi BK

Kriteria penilaian *rendah* terdapat pada sub variabel pemahaman konselor tentang evalusi layanan konsultasi BK, yaitu dengan hasil 51,30 %. Sub variabel ini memiliki nilai rendah, yang berarti konselor belum dapat memahami sepenuhnya tentang ranah penilaian pada layanan konsultasi BK. Pemahaman tentang evaluasi layanan konsultasi meliputi penilaian jangka pendek dan penilaian jangka panjang.

Pada indikator penilaian jangka pendek, dapat diartikan konselor belum bisa mengerti bahwa respon awal konseli terhadap penanganan konsultilah yang dijadikan penilaian. Apabila konselor belum memahami bahwa penanganan masalah konseli pada layanan konsultasi dilakukan oleh konsulti, maka kemungkinan konselor tidak memahami dan melakukan laijapen yang keliru. Kemudian pada indikator penilaian jangka panjang, konselor juga belum memahami bahwa yang menjadi penilaian adalah perubahan konseli terkait dengan hasil konsultasi yang dilakukan konsulti kepada konselor.

d. Sub Variabel Pemahaman Konselor Tentang Hasil Evaluasi Layanan Konsultasi BK

Pemahaman tentang analisis hasil evaluasi menunjukkan kriteria *rendah* dengan prosentase sebesar 59,38 %, berarti bahwa konselor belum memahami tentang upaya mempertimbangkan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan penanganan masalah pihak ketiga oleh konsulti.

Hasil prosentase pada indikator mempertimbangkan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan tergolong rendah. Hal ini dapat dimaknai bahwa konselor belum memahami bahwa analisis hasil evaluasi pada layanan konsultasi dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan adanya konsultasi lanjutan, penghentian layanan konsultasi, atau dengan mempertimbangkan diadakannya alih tangan.

e. Sub Variabel Pemahaman Konselor Tentang Tindak Lanjut Layanan Konsultasi BK

Pada sub variabel pemahaman konselor tentang tindak lanjut layanan konsultasi, hasilnya menunjukkan nilai 51.04 % yang juga berarti dalam kriteria *rendah*. Hasil prosentase rendah ini memberikan makna bahwa konselor belum memahami tentang kegiatan yang dapat dilakukan konselor sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi BK.

Kriteria rendah tersebut memberi gambaran bahwa konselor belum mengetahui bahwa tindak lanjut layanan konsultasi dapat dilakukan dengan diadakan pengulangan penanganan masalah konseli, dihentikannya layanan konsultasi karena tujuan telah tercapai atau diperlukan alih tangan kasus terhadap pihak yang lebih berwenang atas masalah konseli.

4.2. Pembahasan

"Kegiatan bimbingan dan konseling merupakan satu bentuk tiga dimensi dari sub unsur bidang bimbingan, jenis layanan dan kegiatan pendukung, tahapan kegiatan" (Marsudi, 2003; 85). Dari penjelasan tesebut, layanan konsultasi adalah salah satu jenis layanan sehingga merupakan bentuk kegiatan dalam Bimbingan dan Konseling. Konselor sebagai pihak pelaksana layanan perlu memahami tentang langkah-langkah pelaksanaan seluruh layanan, termasuk layanan konsultasi. Dengan pemahaman yang baik, maka akan terwujudkan keberhasilan suatu layanan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase pada penelitian Studi Deskriptif Pemahaman Konselor Tentang Layanan Konsultasi BK Pada SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 diperoleh hasil prosentase 55,79 %, yang termasuk pada kriteria rendah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan konselor di SMP N Sub Rayon 03 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 belum memahami tentang lagkah-langkah yang harus dilakukan pada layanan konsultasi BK dengan baik.

Di jelaskan secara rinci per sub variabel juga tergolong rendah, yaitu meliputi pemahaman konselor tentang perencanaan layanan konsultasi (48,70%), pemahaman konselor tentang pelaksanaan layanan konsultasi (59,91%), pemahaman konselor tentang evaluasi layanan konsultasi (51,30%), pemahaman konselor tentang analisis hasil evaluasi layanan konsultasi (59,38%), dan pemahaman konselor tentang tindak lanjut layanan konsultasi (51,04%).

Menurut Nawawi (dalam Sukardi, 2002: 2) menjelaskan bahwa ’perencanaan pada dasarnya berarti persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu’. Demikian halnya pada penelitian pemahaman konselor tentang layanan konsultasi BK, bahwa dengan pemahaman perencanaan yang baik maka akan diperoleh hasil yang optimal. Sebaliknya, jika konselor belum memahami tentang perencanaannya maka dimungkinkan langkah selanjutnya yaitu pemahaman tentang pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, dan tindak lanjut layanan konsultasi kurang dipahami juga.

Mencermati dari hasil penelitian bahwa pemahaman konselor tentang layanan konsultasi diperoleh hasil rendah, maka fenomena yang dikaji sebelum diadakannya penelitian telah terbukti. Keadaan ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan konselor belum mampu memahami tentang layanan konsultasi, yaitu kompetensi yang dimiliki konselor belum maksimal, terhentinya pertemuan MGP pada SMP sub rayon 03 kota Semarang, pelatihan yang tidak sesuai sasaran, dan masih adanya sikap apatis dari konselor.

Konseling merupakan suatu profesi yang diarahkan untuk membantu dalam pengembangan individu, baik di sekolah atau di masyarakat, yang diselenggarakan oleh tenaga ahli yang professional. Untuk mencapai seorang konselor yang professional, terdapat suatu kompetensi utama minimal profesi. ”Kompetensi merupakan komponen utama dari standard profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi dan kredensi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu” (Direktorat PPTK dan KPT, 2004: 20).

Kompetensi pada profesi konselor salah satunya adalah Kompetensi Keahlian Berkarya (KKB) yaitu konselor memahami dan mempraktikkan jenis-jenis layanan konseling. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman konselor rendah tentang jenis layanan konsultasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konselor di SMP sub rayon 03 kota Semarang belum memiliki kompetensi yang maksimal.

Profesi konselor jelas berbeda dengan profesi lain, meskipun ada kesamaan. Kesamaannya adalah suatu profesi harus mampu ikut serta dalam menumbuhkembangkan profesinya tersebut. Pada profesi konselor termasuk dengan diadakannya Musyawarah Guru Pembimbing (MGP). ”MGP dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kerangka pikir dan kerangka kerja utuh tentang penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan formal” (Kartadinata, dkk. 2007: 11). Kenyataan di lapangan bahwa pertemuan MGP di SMP sub rayon 03 sudah terhenti, dan berdampak pada tidak tersosialisasinya informasi tentang BK, khususnya tentang layanan konsultasi.

”Penyelenggaraan pendidikan tenaga profesi konseling, terutama pendidikan prajabatan, menjadi tanggung jawab perguruan tinggi (LPTK), sementara pendidikan dalam jabatan dikembangkan secara kolaboratif antara perguruan tinggi, pengguna, dan organisasi profesi”. (Direktorat PPTK dan KPT, 2004: 25). Dinas Pendidikan Nasional sebagai pihak yang berwewenang hendaknya dapat memanfaatkan kerjasama dengan LPTK sebagai pelaksana dan pengembang, untuk bertanggung jawab atas pembinaan calon pelaksana pekerjaan

profesi konselor. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, perlu diadakan pelatihan konselor tentang layanan konsultasi sampai pada praktik pelayanannya. Selama ini pelatihan yang sering diadakan hanya tentang layanan yang lain, misalnya bimbingan kelompok dan konseling kelompok.

Penyebab lain yang mengakibatkan rendahnya pemahaman konselor tentang layanan konsultasi adalah adanya sikap apatis dari konselor. Apatis dapat diartikan hilangnya simpati, ketertarikan, dan antusiasme terhadap suatu objek. Menurut Walgito (2001: 110), “sikap mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif”. Berkaitan dengan sikap apatis konselor, secara kognitif konselor meyakini bahwa dengan layanan yang ada sebelumnya, pelaksanaan BK di sekolah sudah dapat berjalan dengan baik. Dipandang dari afektifnya dapat berpengaruh pada rasa tidak mau tahu konselor tentang perkembangan layanan BK. Dari keduanya kemudian berpengaruh terhadap perilaku konselor untuk tidak akan mempelajari tentang perkembangan layanan BK, dan hal ini masuk dalam komponen konatif.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemahaman konselor tentang layanan konsultasi Bimbingan dan Konseling pada SMP Negeri sub rayon 03 kota Semarang tahun pelajaran 2008/2009 yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa konselor belum memahami tentang langkah-langkah atau operasionalisasi layanan konsultasi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil prosentase secara keseluruhan sebesar 55,79% yang tergolong kriteria rendah yaitu meliputi pemahaman konselor tentang perencanaan layanan konsultasi, pemahaman konselor tentang pelaksanaan layanan konsultasi, pemahaman konselor tentang evaluasi layanan konsultasi, pemahaman konselor tentang analisis hasil evaluasi layanan konsultasi, dan pemahaman konselor tentang tindak lanjut layanan konsultasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka perlu disarankan sebagai berikut :

1. Konselor sekolah supaya secara mandiri berusaha mengetahui dan mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan BK dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan Bimbingan dan Konseling.

2. Diharapkan adanya pengembangan pribadi konselor sekolah supaya tidak bersikap apatis dan selalu antusias berkaitan dengan perkembangan BK.
3. Jurusan BK diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi tentang layanan BK, khususnya tentang layanan konsultasi BK dengan mengadakan seminar atau pelatihan tentang layanan BK.
4. Bagi mahasiswa BK, agar memperdalam pengetahuannya tentang layanan konsultasi dan diharapkan dapat melakukan penelitian dengan tema layanan konsultasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. 1997. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Revisi VI*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya

Awalya. 1995. Upaya Pemahaman Siswa Yang Dilakukan Konselor Dalam Melaksanakan Bimbingan di Sekolah. Tesis, tidak diterbitkan. IKIP Bandung

Azwar, Syaifuddin. 2004. *Metode Penelitian.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Pengembangan Diri*. Jakarta: BSNP dan Pusat Kurikulum

Direktorat PPTK dan KPT. 2004. *Dasar Standardisasi Profesi Konseling*. Jakarta: Bagpro Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas

Gunarsa, Singgih. 2007. *Konseling dan Psikoterapi*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia

Harjasujana. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman.* Diambil pada 29 September 2008 pada (http://www.geocities.com)

Kartadinata, dkk. 2007. *Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Depdiknas

Mappiare, Andi. 2004. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Marsudi, Saring. 2003. *Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Mufari. *Jenis – jenis Pemahaman*. Diambil pada tanggal 29 September 2008, dari (http//mufari.files.wordpress.com)

Mugiarso, Heru. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Semarang: UPT MKDK Universitas Negeri Semarang

Prayitno. 2004. *Layanan Konseling.* Padang: BK FIP

Prayitno dan Erman Amti. 2004. *Dasar- dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta

Sciarra, Daniel T. 2004. *School Counseling (Foundations and Contemporary Issues)*. USA: Thomson Learning

Sudrajat, Akhmat (8 Juli 2008). *Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling*. Diambil pada tanggal 16 Oktober 2008, dari (http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/07/08)

Sugiyono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sukardi, Dewa Ketut. 2002. *Manajemen Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Bandung: Alfabeta

Walgito, Bimo. 2001. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Willis, Sofyan S. 2004. *Konseling Individual Teori dan Praktek.* Bandung: Alfabeta

Winkel, W.S. dan M.M. Sri Hastuti. 2005. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi

Zein, Sulaiman (1 Februari 2008). *Rekonseptulisasi Bimbingan dan Konseling*. Diambil pada 16 Oktober 2008, dari (http://smpnbilahhulu. wordpress.com/2008/02/01)

http://konseling indonesia.com/index,php?option=com_content&task=view&id= 23& Itemid=47